



# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KOTA SUMENEP  
TAHUN 2021 - 2026



KECAMATAN KOTA SUMENEP  
Jalan K.H. Agus Salim No. 25



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN KOTA SUMENEP**  
Jl. KH. Agus Salim No. 25 Telp./Fax. ( 0328 ) 662003  
**SUMENEP**

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN CAMAT KOTA SUMENEP  
NOMOR : 188/1410/435.301/2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026

**CAMAT KOTA SUMENEP**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dokumen perencanaan organisasi Perangkat Daerah pada kecamatan kota sumenep, telah ditetapkan Rencana Strategis organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, tambahan Lembaran Negara No 4286);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep merupakan Penjabaran visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026) dijadikan acuan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Kedua : Isi beserta uraian Renstra sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Sumenep

Pada tanggal : 03 Februari 2021

**CAMAT KOTA SUMENEP**

**HERU SANTOSO, S.STP, M.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19820509 2000301 1 004

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	27
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	30
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	32
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	34
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	37
BAB VIII. PENUTUP .....	39

# BAB I

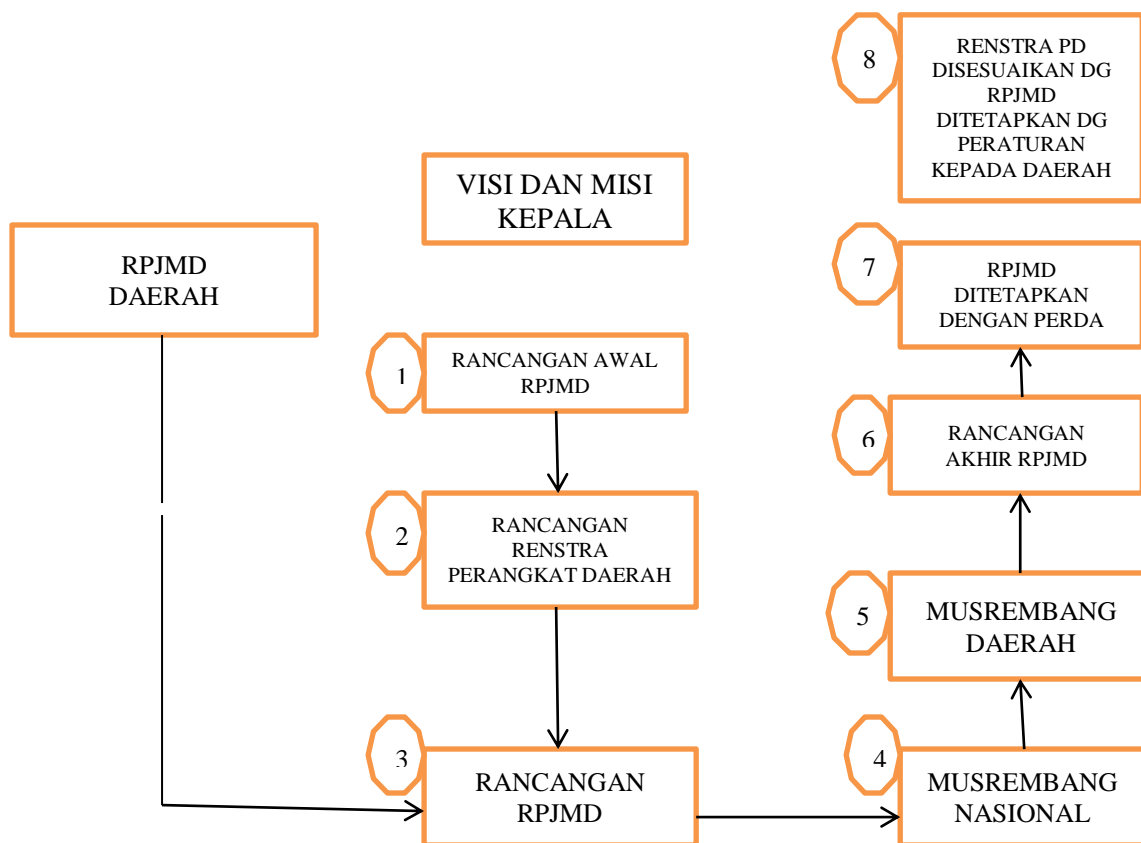
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

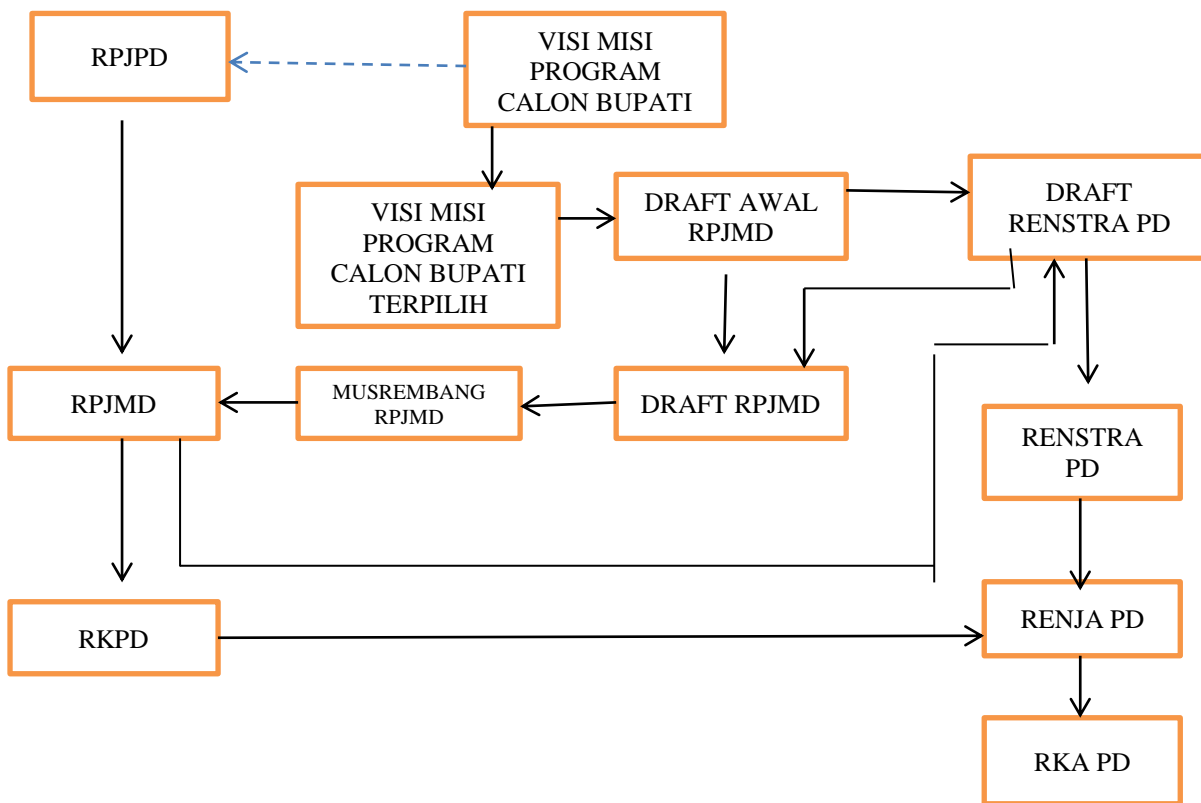
#### PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD



Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari

tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

**HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN  
PERENCANAAN LAINNYA**



Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

**1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kota Sumenep didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
11. Peraturan Bupati Sumenep **Nomor XXX Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Kota Sumenep .

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah dengan Kecamatan Kota Sumenep, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Kota Sumenep .
2. Sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Kota Sumenep dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kota Sumenep yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kota Sumenep tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landsan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URURAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

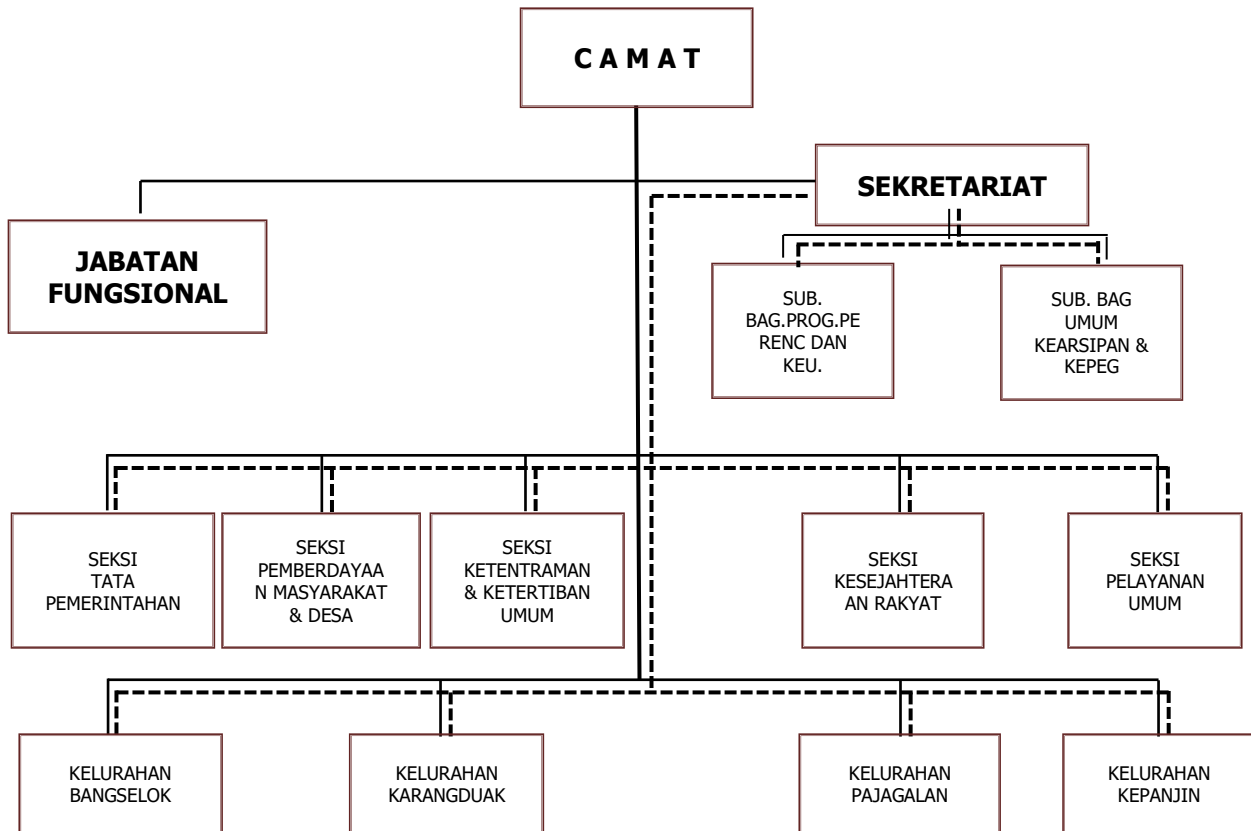
#### **2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR KECAMATAN KOTA SUMENEP**

Pembentukan kecamatan di wilayah tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sehingga cukup panjang apabila seluruhnya diuraikan pada bab ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep **Nomor XX Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kota Sumenep sebagai Kecamatan Tipe A mempunyai struktur sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Koordinasi

### **Komposisi :**

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Kecamatan	: 1 Orang
Kepala Sub Bagian	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Pelaksana	: 53 Orang
Lurah	: 4 Orang

## **2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KOTA SUMENEP**

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia/kepegawaian

Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Kecamatan Kota Sumenep berjumlah sebagai berikut :

PNS : 34 orang

Non PNS : 28 orang

Pegawai Kecamatan Kota Sumenep

	Uraia	Laki -	Perem- puan	Gol I	Gol . II	Gol .III	IV	Jumlah
1.	Camat	1	0	0	0	0	1	1
2.	Sekretaris		0	0	0	1	0	1
3.	Kasi kecamatan	4	1	0	0	5	0	5
4.	Kasubag		1	0	0	2	0	2
5.	JFU kecamatan		3			3	0	23
6.	JFT kecamatan	0	0	0	0	0	0	0
7.	Non PNS	6	2	0	0	0	0	8
8.	Lurah	3	1	0	0	4	0	4
9.	Sekretaris	4	0	0	0	4	0	4
10.	Kasi Kelurahan	2	0	0	0	0	0	0
11.	JFU kelurahan	0	0	0	0	0	0	0
12.	Non PNS Kelurahan	5	1	0	0	0	0	6
	Jumla	25	9	0	0	19	0	53

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Kota Sumenep 2020;

Tabel 2.2  
Data Pegawai Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjurangan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - Laki	Perempua n
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	11	8	3
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	8	4	4

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Kota Sumenep 2020;

Tabel 2.3  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat  
Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	S2		3	0
2	S1		4	0
3	D III		1	
4	SLTA	1+	14	1
5	SLTP		0	0
6.	SD		0	0
	Jumla			

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Kota Sumenep 2020;

Tabel 2.4

Data Pegawai Berdasarkan  
Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	III A			-
2	III B			
3	IV A	1	4	1
4	IV B	3	13	5

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Kota Sumenep 2020;

**2.2.2. SARANA DAN PRASARANA**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Sumenep adalah

sebagai berikut :



Tabel 2.2

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS  
( REKAP HASIL SENSUS )**

SKPD : KANTOR KEC. KOTA SUMENEP DAN 4 KELURAHAN  
 KABUPATEN : SUMENEP  
 : JAWA  
 PROVINSI : TIMUR

NO. URUT	GOLO NGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	<b>TANAH</b>	<b>1</b>	<b>1.243.385.618,00</b>	
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>354</b>	<b>2.032.954.160,46</b>	
		02	a. Alat - alat Besar	1	5.130.000,00	
		03	b. Alat - alat Angkutan	23	625.288.630,00	
		04	c. Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	
		05	d. Alat - alat Pertanian / Peternakan	0	0,00	
		06	e. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	321	1.325.548.017,00	
		07	f. Alat - alat Studio dan Komunikasi	9	76.987.513,46	
		08	g. Alat - alat Kedokteran	0	0,00	
		09	h. Alat - alat Laboratorium	0	0,00	
		10	i. Alat - alat Keamanan	0	0,00	
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>7</b>	<b>1.366.152.670,00</b>	
		11	a. Bangunan dan Gedung	7	1.366.152.670,00	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-	
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>12</b>	<b>857.312.500,00</b>	

		13	a. Jalan dan Jembatan	4	651.312.500,00	
		14	b. Bangunan Air / Irigasi	8	206.000.000,00	
		15	c. Instalasi	0	-	
		16	d. Jaringan	0	-	
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		17	a. Buku Perpustakaan	0	0,00	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	0,00	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>				<b>374</b>	<b>5.499.804.948,46</b>	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KOTA SUMENEP

#### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Sumenep

excel

### 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN





**TABEL 2.7**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**KECAMATAN KOTA SUMENEP**  
**KABUPATEN SUMENEP**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219,374,300	157,688,300	119,554,000	449,486,063		214,019,048	154,345,605	116,939,271	446,943,056							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47,480,000	57,587,346	78,690,000			47,480,000	56,495,841	78,689,661								
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19,000,000	0	23,000,000			19,000,000	0	23,000,000								
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	-	-	25,240,000			-	-	25,240,000								
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8,668,000	-	-			8,668,000	-	-								
Prog. Pembinaan Desa dan Peningk. Kapasitas Aparatur Desa	272,949,700	113,267,500	111,770,000	77,615,000		272,389,700	113,267,500	111,770,000	77,570,000							
Program Sarana Promosi Unggulan Daerah	-	13,365,500	10,100,000			-	13,365,500	10,100,000								
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	16,596,000	16,296,000	14,996,000	-		16,596,000	16,296,000	14,996,000	-							
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi				449,486,063	438,319,100				446,943,056	437,083,187				99.28		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				-	12,002,900				-	12,002,900				-		
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				90,115,000	73,670,500				90,065,000	73,668,900				99.94		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Bangselok				144,882,910	264,818,989	-	-		141,849,152	198,421,389				97.91		
Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangselok				680,415,000	577,830,000		-	-	597,700,500	437,355,000				87.84		
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangselok				446,948,000	402,988,000				425,091,200	341,632,500				95.11		
Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Karangduak				141,751,210	263,211,989				138,812,098	257,168,081				97.93		
Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangduak				696,170,000	432,220,000				654,922,400	405,170,000				94.08		
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangduak				431,193,000	603,905,000				399,806,000	585,429,500				92.72		
Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Kepanjin				141,986,817	259,211,989				138,573,669.00	247,545,263				97.6		
Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Kepanjin				702,820,000	498,750,000				644,555,000	481,690,000				91.71		
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepanjin				424,543,000	557,215,000				388,913,500	542,089,000				91.61		
Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Pajagalan				138,201,750	269,711,989				133,545,701	265,419,194				96.63		
Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Pajagalan				811,012,000	662,545,000				760,992,000	587,555,000				93.83		
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajagalan				316,351,000	312,780,000				299,429,500	303,827,250				94.65		

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN KOTA SUMENEP**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA KECAMATAN		UNIT KERJA KECAMATAN PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TAHUN 1 2021	TAHUN 2 2022	TAHUN 3 2023	TAHUN 4 2024	TAHUN 5 2025	TAHUN 6 2026	TARGET	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Kota Sumenep		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan daerah	5,463,224,820	5,545,173,192	5,628,350,790	5,712,776,052	5,798,467,693	5,885,444,708	100%	5,885,444,708	Sekcam	Kecamatan Kota Sumenep
			1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Laporan Kinerja OPD tepat waktu	3,057,560	3,174,629	3,293,454	4,314,061	3,536,477	3,660,729	100%	3,660,729	Kasub. PPK	Kecamatan Kota Sumenep
			2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	5,191,589,972	5,191,707,041	5,191,825,866	5,191,946,473	5,192,068,889	5,192,193,141	100%	5,192,193,141	Kasub. UKK	Kecamatan Kota Sumenep
			3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang di sediakan	15,312,000	15,429,069	15,547,894	15,668,501	15,790,917	15,915,169	100%	15,915,169	Kasub. UKK	Kecamatan Kota Sumenep
			4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	41,756,580	41,873,649	41,992,474	42,113,081	42,235,497	42,359,749	100%	42,359,749	Kasub. UKK	Kecamatan Kota Sumenep

			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	25,807,758	25,924,827	26,043,652	26,164,259	26,286,675	26,410,927	100%	26,410,927	Kasub. UKK	Kecamatan Kota Sumenep
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	106,128,369	106,128,369	106,247,221	106,366,046	106,486,653	106,733,321	100%	106,733,321	Kasub. UKK	Kecamatan Kota Sumenep
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	79,970,751	80,087,820	80,206,645	80,327,252	80,449,668	80,573,920	100%	80,573,920	Kasub. PPK	Kecamatan Kota Sumenep
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan</b>	<b>78,008,200</b>	<b>79,178,323</b>	<b>80,365,998</b>	<b>81,571,488</b>	<b>82,795,060</b>	<b>84,036,986</b>	100%	<b>84,036,986</b>	Kasi Pelayanan	Kecamatan Kota Sumenep
			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi umum yang tepat waktu	66,635,000	72,485,615	73,088,360	73,691,105	74,302,891	74,923,854	100%	74,923,854	Kasi Pelayanan	Kecamatan Kota Sumenep
			2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi umum yang tepat waktu	11,331,200	17,181,815.00	17,784,560.00	18,387,305	18,999,091	19,620,054	100%	19,620,054	Kasi Pelayanan	Kecamatan Kota Sumenep
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan</b>	<b>15,026,040</b>	<b>15,251,431</b>	<b>15,480,202</b>	<b>15,712,405</b>	<b>15,948,091</b>	<b>16,187,313</b>	100%	<b>16,187,313</b>	Kasi PMD	Kecamatan Kota Sumenep
			1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	15,026,040	15,251,431	15,480,202	15,712,405	15,948,091	16,187,313	100%	16,187,313	Kasi PMD	Kecamatan Kota Sumenep

			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terjadinya gangguan Keamanan dan Stabilitas</b>	44,011,500	44,671,673	45,341,748	46,021,874	46,712,202	47,412,885	100%	47,412,885	Kasi Tapem	Kecamatan Kota Sumenep
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	43,905,300	44,565,473	45,235,548	45,915,674	46,606,002	47,306,002	100%	47,306,002	Kasi Tapem	Kecamatan Kota Sumenep
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang dibina dan diawasi</b>	79,857,100	81,054,957	82,270,781	83,504,843	84,757,415	86,028,776	100%	86,028,776	Kasi Tapem	Kecamatan Kota Sumenep
			1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	79,724,100	80,921,957	82,137,781	83,371,843	84,624,415	84,751,351	100%	84,751,351	Kasi Tapem	Kecamatan Kota Sumenep



||

**TABEL 7.2**  
**TABEL 7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												OPD	
			-2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	13	
<b>FUNGSI KOORDINASI</b>																	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	%			5,463,224,820		5,545,173,192		5,628,350,790		5,712,776,052		5,798,467,693		5,885,444,708		Kecamatan Kota Sumenep
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan Desa	Indeks			78,008,200		79,178,323		80,365,998		81,571,488		82,795,060		84,036,986		
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	%			15,026,040		15,251,431		15,480,202		15,712,405		15,948,091		16,187,313		
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terjadinya gangguan kemandirian dan stabilitas	%			44,011,500		44,671,673		45,341,748		46,021,874		46,712,202		47,412,885		
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%			79,857,100		81,054,957		82,270,781		83,504,843		84,757,415		86,028,776		